36

SMALL SCALE FORESTRY AND FOREST PRODUCT INDUSTRY
Jawaban Komprehensif Terhadap Masalah Pembangunan di Propinsi Berlahan Marjinal

Dudung Darusman
(Lektor Kepala Madya Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Dekan Fahutan IPB)

Makalah Pembahas terhadap Makalah Utama Drs J.P. Djandam, disampaikan pada "Seminar Pelestarian Hutan Produksi Kalimantan Tengah", tanggal 4 Desember 1993 di Palangkaraya

Tulisan ini merupakan tanggapan terhadap makalah utama Drs. Ir J. P. Djandam yang berjudul "*Pemanfaatan Limbah Land Clearing dan Eksploitasi dalam Rangka Pelestarian Hutan Produksi di Propinsi Kalimantan Tengah*". Setelah membaca makalah utama tersebut yang terasa sangat padat uraiannya, berikut ini dikemukakan 2 butir pokok bahasan, yang disampaikan sesingkat mungkin karena ketersediaan waktu pembahasan yang sangat singkat.

1. Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Kayu

Dengan ilustrasi angka limbah yang sangat besar seperti dikemukakan pada makalah utama, maka pantaslah mereka yang mau dan mampu memanfaatkan limbah kayu menjadi produk-produk yang bernilai dan laku di pasar dianggap sebagai pejuang kelestarian hutan dan industrinya. Mereka haruslah lebih dahulu mendapat penghargaan daripada yang mau (semoga juga mampu) melaksanakan HTI.

Ada hal-hal prinsip yang harus dipahami dalam pananganan limbah kayu, terutama dari kegiatan eksploitasi yang akan terus berlanjut. Sementara kegiatan *land clearing* dari pembangunan non-kehutanan dan HTI diharapkan akan segera berhenti atau berkurang apabila segera dapat disadari betapa besarnya hasil manfaat yang dapat diberikan hutan alam kepada masyarakat, seperti akan lebih dijelaskan pada salah satu bagian uraian berikut. Hal-hal prinsip tersebut adalah :

Pertama, bahwa limbah kayu terjadi lebih disebabkan karena bagian kayu tersebut bersifat sub-marginal, yakni kalau terus diambil, diolah dan dijual akan diperoleh penerimaan yang lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Jadi dalam prakteknya, faktor ekonomi lebih menentukan dari pada faktor teknologi.

Kedua, bahwa limbah bukan merupakan sumberdaya bebas, tapi merupakan eksternaliti atau efek sampingan dari suatu kegiatan produksi, akibat rendahnya efisiensi ekonomi. Bagi pengusaha yang bersangkutan tidak ada kerugian apa-apa apabila bagian kayu yang disebut limbah tersebut tidak terjual. Sebaliknya manakala bagian tersebut menjadi berharga, misalnya ada pengusaha lain yang membuktikan bahwa dengan pengelolaan tertentu limbah tersebut memberi keuntungan, maka limbah tersebut akan ditahan untuk diolah sendiri dan dijual.

Oleh karena itu upaya penanganan dan pemanfaatan limbah untuk industri perlu mencakup 2 kebijaksanaan pokok, yakni :

Pertama, pemberi insentif agar bagian kayu tertentu secara ekonomi tidak termasuk sub-marginal, misalnya pengenaan pungutan-pungutan terhadap kayu limbah yang lebih rendah, dsb.

Kedua, pengembangan industri pengolahan limbah haruslah terintegrasi dengan pengusaha penghasil limbah tersebut, kalaulah tidak terintegrasi akan berhadapan dengan ketidakpastian *supply* limbah tersebut sebagai bahan bakunya. Wujud integrasi tersebut dapat berupa "*integrated wood industries*" dalam perusahaan yang bersangkutan, atau bekerjasama dengan masyarakat setempat (perorangan atau koperasi), sehingga dapat mengembangkan "*home industry*".

Sesungguhnya penyebab besarnya limbah kayu yang terjadi, yang berarti rendahnya efisiensi pengusahaan hutan, adalah berpangkal pada 3 kebijaksanaan makro kehutanan, yakni :

Pertama, skala perusahaan yang besar-besar sehingga terlalu kuat mengusai dan mengendalikan pasar, atau pasar menjadi jauh dari suasana yang kompetitif. Hanya pasar yang kompetitif yang dapat mendorong peningkatan efisiensi.

Kedua, pemaduan kepemilikan HPH dengan Industri Pengolahan yang meniadakan pasar kayu bulat, baik sebagai *output* HPH maupun sebagai *input* industri. Harga ditetapkan oleh mekanisme "*internal trade*" yang tertutup atau tidak jelas, sehingga tidak menjadi pendorong peningkatan efisiensi.

Ketiga, pungutan-pungutan yang merupakan hak pemerintah sebagai pemilik *asset* hutan yang diusahakan HPH masih terlalu rendah dibandingkan "*economic rent*"-nya. Keuntungan yang terlalu besar tidak mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi.

Oleh karena itu, berbagai upaya penangangan dan pemanfaatan limbah yang dikemukakan dalam makalah utama, perlu dilandasi oleh pemikiran serta diikuti oleh perubahan orientasi kebijaksanaan makro seperti diuraikan di atas.

2. *Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan*

Dengan memperhatikan kondisi sumberdaya lahan serta kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat, tampaknya kurang cocok apabila pembinaan masyarakat desa sekitar hutan diarahkan kepada pertanian intensif dan *resetlement*. Sudah banyak penelitian dan pengamatan, diantaranya Iba Tahan (1993) di daerah Kotawaringin Barat dan Inoue (1987-1989) di seluruh Kalimantan Timur, yang manyatakan bahwa pola pertanian intensif dan *resetlement* di samping tidak sesuai untuk lahan marginal dan menyebabkan "*cultural shock*", juga memiliki pasar produknya yang tidak stabil. Sementara kegiatan kehutanan, apabila dikembangkan bagi masyarakat setempat diharapkan akan cukup mantap, karena di samping kegiatannya cukup lama dikenal dan ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya hutan yang melimpah, juga memiliki pasar produknya yang stabil, bahkan cenderung semakin baik.

Sesungguhnya, sumberdaya hutan alam untuk satu jenis produk barang atau jasa memang memberi manfaat yang kecil, namun untuk banyak jenis produk barang dan jasa yang diperlukan manusia, hutan alam memberi hasil manfaat yang sangat besar. Kalau pandai-pandai mengelola dan mengusahakannya, hutan alam dapat menciptakan *income* atau nilai tambah, serta lapangan kerja yang cukup besar bagi seluruh masyarakat. Hal ini secara potensial sangat baik/cocok bagi pengembangan masyarakat desa sekitar hutan, dimana unit pengelolaan tidak perlu besar tapi menghasilkan banyak macam produk barang dan jasa.

Mengelola ekosistem hutan secara alami untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa kebutuhan manusia adalah kecenderungan dari kemajuan berpikir manusia untuk dapat mempertahankan hidupnya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kelimpahan hutan di Kalimantan Tengah perlu dipelihara dan disyukuri. Tinggallah bagaimana kepandaian masyarakat Kalimantan Tengah agar dapat segera ditingkatkan, melalui pendidikan, sehingga mampu mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya secara lestari, disertai tentunya dengan peraturan dan perundangan yang memberi akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hutan tersebut.

Dari kedua pokok bahasan di atas terlihat pentingnya pengembangan apa yang disebut "*small scale forestry and forest product industry*" di wilayah yang memiliki kondisi lahan marginal, serta sosio-ekonomi dan budaya yang dekat dengan alam seperti Propinsi Kalimantan Tengah, yang tidak hanya dalam rangka penekanan dan pemanfaatan limbah kayu, tapi juga dalam rangka pembangunan wilayah dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan.